

**PELAKSANAAN PROSEDUR PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

**(Studi Implementasi Pasal 106 Angka 3 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**oleh :
GURUH BAYU SAPUTRA
105010101111091**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROSEDUR PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG. (Studi Implementasi Pasal 106 Angka 3 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).**

Identitas Penulis

a. Nama : **Guruh Bayu Saputra**

b. Nim : **105010101111091**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Tunggul Anshari, SH.M.Hum
NIP : 195905 24198601 1 001

Dr.Sinta Hadiyantina SH.MH
NIP : 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Lutfi Efendi SH.M.Hum
NIP : 19600810 198601 1 002

Dr.Rachmad Safa'at SH.M.Si
NIP : 19620805 198802 1 001

IDENTITAS TIM PENGUJI

Ketua Majelis : Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Agus Yulianto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 10/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : GURUH BAYU SAPUTRA
NIM : 105010101111099
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PROSEDUR PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI WILAYAH KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
(Studi Implementasi Pasal 106 Nomor 3 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Tentang Pajak Daerah)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : Guruh Bayu Saputra
TEMPAT/TGL LAHIR : Lumajang / 10-12-1991
JENIS KELAMIN : Laki-laki
ALAMAT : JL.Raya Senduro No.14 Desa Senduro
Kec. Senduro Kab. Lumajang, Jawa Timur
E-MAIL : guruhbayu.saputra@yahoo.com
NO.TELP : 085336019883
AGAMA : Islam
STATUS : Belum menikah
TINGGI/BERAT BADAN : 175/64
KEWARGANEGARAAN : WNI
NAMA AYAH : RIBUT MUSTAJAB
IBU : RAHAYU

RIWAYAT PENDIDIKAN

1996-1998 TK AISYAH BUSTANUL ATFAL SENDURO
1998-2004 SDN SENDURO 2
2004-2007 SMPN 1 SENDURO
2007-2010 SMAN 3 LUMAJANG
2010-Sekarang UNIVERSITAS BRAWIJAYA, FAKULTAS HUKUM

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan data dalam penulisan Skripsi ini. Semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan menjadi warga Negara yang patuh terhadap aturan hukum.

Malang, 11 Januari 2018

(Guruh Bayu Saputra)

PELAKSANAAN PROSEDUR PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

(Studi Implementasi Pasal 106 Angka 3 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Guruh Bayu Saputra

Email: guruhbayu.saputra@yahoo.com

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sampai saat ini, database yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang masih belum optimal. Beberapa permasalahan database yang menjadi penghambat dalam proses pengurangan hutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah masih belum akurat dan terinci terkait subyek dan obyek pajak di seluruh Kabupaten Lumajang. Sosialisasi tentang perpajakan, khususnya mengenai prosedur pengurangan hutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Artinya, hambatan-hambatan tersebut sebagai akibat dari kurang maksimalnya manajemen dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Prosedur, Pengurangan Ketetapan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**THE IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURE REDUCTION OF A
REGARDING REGULATION THE TAX OF LAND AND BUILDING RURAL AND
URBAN AREAS IN THE WORK AREA OF THE LOCAL OFFICE OF THE
FINANCIAL MANAGER AND ASSETS OF LUMAJANG DISTRICT.**

**(Based On a Implementation Study Of Article 106 Points 3 Ltter E Shall There Is a
Regional Regulation of Lumajang District Number 2 Years 2017 On Amendments To
The Regional Regulation Number 4 years 2011 Regarding Of Local Tax).**

The Faculty Of Law, Universitas Brawijaya

Guruh Bayu Saputra

Email: guruhbayu.saputra@yahoo.com

Result of land and building rural and urban areas based on regulation of Indonesia Republic number 28 years 2009 on local taxes and levies which may be the regions as well as there is a regional regulation of Lumajang District number 2 years 2017 regarding the amendment of the bylaw no 4 years 2011 on local taxes, is a tax upon the land and or building to which it belongs, easily swayed and led away, and or be misused by irresponsible by a private person or the risk management certificate agency, with the exception of the area in which is used for business activities in the plantation sector, forestry, and mining .Up to the present time, a database that are managed by the local office of financial management and related to city owned assets of Lumajang district is not optimal yet .Several problems a database that are became an impediment to in a process of reduction compulsory payment of every debt result of land and building rural and urban areas is it has still not been accurate and detailed related to the source and target of taxes and service in all of the approximately Lumajang districts. Ongoing awareness campaign on the decision to lift the tax of income, especially in regard to the procedure the reduction of compulsory payment of every debt result of land and building rural and urban areas .This means, The barriers as a result of less maximum management from the office of financial management and local asset of Lumajang district.

Keywords: the implementation , procedure , the reduction of the command, land and building tax of rural and urban areas.

PENGANTAR

Penulisan Skripsi dan pemilihan judul yang penulis ambil dalam rangka untuk menambah pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat umum mengenai bagaimana pelaksanaan prosedur pengurangan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dengan lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Kabupaten Lumajang yang menjadi domisili Penulis sendiri, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi model substansi serta sosialisasi yang *massive* mengenai permasalahan yang penulis angkat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan data dalam penulisan Skripsi ini. Semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan menjadi warga Negara yang patuh terhadap aturan.

Malang, 11 Januari 2018

(Guruh Bayu Saputra)

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan	x
<i>Summary</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Peneliti	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pelaksanaan	13
B. Pengertian Prosedur	16
C. Pengertian Pajak, Jenis Pajak dan Fungsi Pajak	17
C.1. Pengertian Pajak	17
C.2. Jenis Pajak	20
C.3. Fungsi Pajak	21
D. Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan	22
E. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23
F. Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25
F.1. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25

F.2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26
G. Sistem dan Asas-asas Pemungutan Pajak	27
G.1. Sistem Pemungutan Pajak	27
G.2. Asas-asas Pemungutan Pajak	28
H. Tinjauan Umum tentang Pengurangan Piutang PBB P2	30
H.1. Kriteria wajib pajak yang menerima pengurangan PBB P2	31
H.2. Tata cara permohonan pengurangan PBB P2	32
H.3. Syarat Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak PBB P2	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Alasan Pemilihan Lokasi	39
D. Jenis Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Memperoleh Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Definisi Operasional	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	44
A.1. Sejarah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	44
A.2. Peran dan Tugas Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	46
A.3. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	48
A.3.1. Visi	48
A.3.2. Misi	50
A.4. Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	51

B. Pelaksanaan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	54
C. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Prosedur Pengurangan Ketetapan Piutang Pajak di Wilayah Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penerimaan Pajak PBB P2 di Kabupaten Lumajang	60
Tabel 2	Daftar nama yang mendapat SK Pengurangan Pajak PBB P2 di Kabupaten Lumajang pada tahun 2014	63
Tabel 3:	Daftar nama yang mendapat SK Pengurangan Pajak PBB P2 di Kabupaten Lumajang pada tahun 2015	64
Tabel 4:	Daftar nama yang mendapat SK Pengurangan Pajak PBB P2 di Kabupaten Lumajang pada tahun 2015	65

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	53
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Dosen Skripsi.
2. Surat Permohonan Izin Survey.
3. Surat Pemberitahuan Untuk melakukan Penelitian
4. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi.
5. Kartu Bimbingan Skripsi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
7. Surat Pernyataan Keaslian Penulisan.
8. Jurnal Skripsi.